

# Spirit Keislaman dan Keindonesiaan dalam Karya Abdurrahman Wahid dan Masdar Farid Mas'udi <sup>1</sup>

Oleh : Nurrohman

## Abstrak

*Agama dan Negara ibarat dua sisi dari satu mata uang. Ia dapat dibedakan tapi sulit atau mustahil dipisahkan. Dalam sejarah Islam, khususnya dalam tradisi Sunni, Al-Ghazali, salah satu tokoh sunni yang amat berpengaruh di dunia Islam menggambarkan hubungan antara agama dan kekuasaan seperti dua kembar yang lahir dari satu perut ibu dengan menyatakan sebagai berikut. al-din wa al-mulk, tau'amani mitslu akhawaini wulida min bathnin wâhidin. Al-Mawardi tokoh Sunni lainnya mengatakan al-mulk bi al-dini yabqa wa al-dini bi al-mulki yaqwa. Hal ini menjadikan keislaman dan keindonesiaan juga sulit dipisahkan. Melalui kajian pustaka, tulisan ini bermaksud menangkap spirit keislaman dan keindonesiaan dalam karya Abdurrahman Wahid dengan judul Islamku, Islam Anda dan Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi, The Wahid Institute, 2006 dan karya Masdar Farid Mas'udi yang berjudul : Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam, Pustaka Alvabet 2011. Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun kedua tokoh Nahdlatul Ulama ini sering dikelompokkan sebagai tokoh yang progresif bahkan liberal, keduanya tetap memandang pentingnya memadukan antara spirit keislaman dan kebangsaan di Indonesia.*

Agama dan Negara ibarat dua sisi dari satu mata uang. Ia dapat dibedakan tapi sulit atau mustahil dipisahkan. Dalam sejarah Islam, khususnya dalam tradisi Sunni, Al-Ghazali, salah satu tokoh sunni yang amat berpengaruh di dunia Islam menggambarkan hubungan antara agama dan kekuasaan seperti dua kembar yang lahir dari satu perut ibu dengan menyatakan sebagai berikut. *al-din wa al-mulk, tau'amani mitslu akhawaini wulida min bathnin wâhidin* (Al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbûk*, hlm.50). Al-Mawardi tokoh Sunni lainnya mengatakan: *al-mulk bi al-dini yabqa wa al-dini bi al-mulki yaqwa* (Al-Mawardi, *Adabu al-Dunya wa al-Din*, Bairut, Dar al-Fikr, tanpa tahun, hlm.137,138)

Bagi al-Mawardi, negara memerlukan enam sendi utama yakni : 1) agama yang dihayati, 2) penguasa yang berwibawa 3) keadilan yang menyeluruh, 4) keamanan yang merata, 5) kesuburan tanah yang berkesinambungan 6) harapan kelangsungan hidup. Menurutnya, agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan sebagai pengawas yang melekat atas hati nurani manusia, karenanya merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara. (Al-Mawardi, *Adabu al-Dunya wa Din*).

Hal yang perlu dicatat disini adalah bahwa agama yang dihayati tidak identik dengan agama yang diformalkan atau diundangkan dalam perundang-undangan oleh penguasa atau Negara.

Itulah sebabnya, dalam sejarah Islam, relasi hukum Islam (syariat) dan Negara itu unik. Hukum Islam dalam sejarahnya tidak identic dengan tradisi yang berkembang di negara-negara penganut *common law* juga tidak sama dengan Negara-negara yang menganut tradisi *civil law*.

---

<sup>1</sup>(Kajian terhadap tiga buku: *Ilusi Negara Islam, Islamku Islam Anda Islam Kita, Syarah Konstitusi UUD 1945* yang diselenggarakan oleh Panitia Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Santri (LKMS), Pondok Pesantren Mahasiswa Universal (PPMU) pada tanggal 3 Februari 2017 di PPMU.

Lubna A Alam dalam tulisannya yang berjudul: *Keeping The State Out: The Separation of Law And State In Classical Islamic Law* (Michigan Law Review; Apr 2007, Vol. 105 Issue 6, p1255) mengatakan bahwa sejarah Islam klasik, yang berakhir pada abad keenambelas, telah memperlihatkan munculnya negara-negara Islam yang dibarengi dengan formasi system hukum Islam yang komplek. Sejak awal kandungan hukum Islam sebagian besar dikembangkan diluar pengaruh maupun tekanan politik.

Alam, selanjutnya menjelaskan, bahwa sementara di peradaban lain, termasuk peradaban Barat, negaralah yang mengundang dan melaksanakan hukum, dalam peradaban Islam, Negara tidak ikut ambil bagian dalam tata kelola hukum atau tidak ikut menciptakan dan mengundang hukum. Karena otoritas itu diambil alih oleh system otoritas diluar politik kekuasaan Negara. Dengan kata lain, hukum Islam sebenarnya merupakan representasi pandangan ahli hukum (*jurists law*) karena ia diciptakan dan dikembangkan oleh para spesialis secara privat melalui ilmu hukum tanpa melibatkan Negara. Buku-buku induk yang dikarang para ulama madzhab itulah yang menjadi rujukan utama bagi penerapan hukum.

### *Relasi Agama dan Negara dalam Era Modernisme dan Konstitusionalisme*

Uniknya hubungan agama dan Negara dalam Islam di masa klasik, yang berdampak pada uniknya hubungan antara hukum Islam dan Negara, berlanjut sampai ke masa modern, disaat Negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim menyatakan kemerdekaannya.

Munawir Syadzali dalam bukunya, *Islam dan Tata Negara* menyebutkan adanya tiga teori atau aliran.

Aliran pertama pada umumnya berpendirian bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik, oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali pada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan Nabi besar Muhammad saw dan oleh empat *al-Khulafa al-Rasyidiin*. Tokoh utama dari aliran ini adalah antara lain Syekh Hasan al-Bana, Sayyid Quthub, Syekh Muhammad Rasyid Ridla dan yang paling vokal adalah al-Maududi.

Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali pada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi-pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain Ali Abd al Raziq dan Dr. Thaha Husein.

Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak bahwa Islam adalah suatu agama, dalam pengertian Barat, yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Diantara tokoh dari aliran ini yang terhitung cukup menonjol adalah Dr. Muhammad Husein Haekal

Masykuri Abdillah dalam tulisannya di harian Kompas (25 Februari 2000) mengatakan bahwa hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan kedalam tiga bentuk yakni *integrated*, *intersectional* dan *separated*. Hubungan *integrated* adalah hubungan yang menyatu antara agama dan negara, dimana aturan-aturan agama secara otomatis menjadi aturan-aturan negara, dan kepemimpinan keagamaanpun sekaligus menjadi pemimpin negara, seperti praktek kenegaraan di Iran dan Vatikan. Hubungan *intersectional* adalah hubungan yang menggambarkan adanya persinggungan antara agama dan negara. Adakalanya persinggungan ini hampir sempurna, yakni jika hukum-hukum agama menjadi hukum positif sebuah negara

, seperti praktek kenegaraan di Arab Saudi. Adakalanya persinggungan ini hanya sebagian saja, yakni jika sebuah negara hanya sedikit saja mengadopsi hukum agama menjadi hukum positif, seperti praktek kenegaraan di Indonesia. Hubungan sekularistik atau *separated*, adalah hubungan pemisahan antara agama dan negara seperti praktek kenegaraan di Turki dan sebagian besar dunia Kristen.

Sejalan dengan variasinya hubungan agama dan politik, peran agama dalam politik juga bervariasi. Peran agama dalam politik bisa diklasifikasikan kedalam tiga bentuk. Pertama agama sebagai ideologi politik, kedua agama sebagai landasan etika, moral dan spiritual dan ketiga agama sebagai sub-ideologi. Negara yang menempatkan agama sebagai ideologi, cenderung akan melaksanakan ajaran agama (syari'at dalam konteks Islam) secara formal sebagai hukum positif serta melakukan pendekatan struktural dalam sosialisasi dan institusionalisasi ajaran agama. Negara yang menempatkan agama sebagai sumber etika, moral dan spiritual cenderung akan mendukung pendekatan kultural dan menolak pendekatan struktural dalam hal sosialisasi dan institusionalisasi ajaran agama. Artinya pelaksanaan ajaran agama tidak perlu dilembagakan melalui perundang-undangan dan dukungan negara, tetapi cukup dengan kesadaran umat Islam atau umat beragama sendiri. Negara yang menempatkan agama sebagai subideologi cenderung akan mendukung pendekatan kultural sekaligus struktural, yakni dengan melibatkan ajaran agama dalam pengambilan kebijakan publik dengan cara yang konstitusional dan demokratis secara tidak diskriminatif.

Ahmet T.Kuru dalam bukunya "**Secularism and State Policies toward Religion** (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2009.) menyebutkan empat tipe Negara: 1) Negara agama ( contohnya Iran, Saudi Arabia, Vatikan) 2) Negara dengan satu agama resmi ( contohnya Inggris, Yunani dan Denmark), 3) Negara sekuler 4) Negara anti agama ( contohnya Cina dan Korea Utara). Dengan menjadikan prinsip *bineka tunggal* ika sebagai semboyan Negara, Kuru menempatkan Indonesia dalam kategori Negara sekuler.<sup>2</sup>

Ada dua jenis sekulerisme menurut Kuru a) sekularisme pasif seperti Amerika Serikat yang membolehkan symbol-simbol agama di ruang public dan sekularisme aktif seperti Perancis ( Turki juga semula penganut sekularisme aktif) yang melarang symbol agama berada atau tampak di ruang public. Keputusan pengadilan Perancis yang membatalkan larangan burkini, menunjukkan bahwa Perancis juga telah bergeser menjadi sekularisme pasif, meskipun di beberapa wilayah masih ada yang tetap memegang kebijakan sekularisme aktif. Oleh Kuru, Indonesia seperti Amerika Serikat masuk kategori Negara sekuler pasif.

Banyak tokoh di Indonesia, kemudian menyatakan bahwa Indonesia bukan Negara agama maupun bukan Negara sekuler. Disebut bukan Negara agama, karena Indonesia, meskipun didasarkan atas spirit ketuhanan, tidak didasarkan atas satu agama tertentu. Ia tidak disebut Negara sekuler karena, Indonesia tidak memisahkan secara kaku antara urusan Negara dan urusan agama.

---

<sup>2</sup> Dengan sedikit modifikasi, relasi agama dan Negara dilihat dari kebijakan Negara terhadap agama dapat dibagi tiga : 1) negara agama 2) Negara anti agama dan 3) Negara sekuler (netral) terhadap agama. Negara agama contohnya Iran, Vatikan Saudi Arabia, Negara anti agama contohnya, Cina dan Korea Utara, Negara sekuler (netral terhadap agama) contohnya Amerika, Inggris, Perancis, Denmark dan lain-lain. Negara sekuler dibagi lagi ada *assertive secularism* dan *passive secularism*. *Assertive secularism* adalah Negara sekuler yang agresif dalam meniadakan symbol-simbol agama di ruang public, contohnya Prancis. Sedangkan *passive secularism*, adalah Negara yang dalam menjalankan kebijakan *secularism*-nya tetap membiarkan adanya simbol agama di ruang public atau dalam Negara. Contohnya Amerika Serikat. Indonesia masuk Negara sekuler yang pasif.

Terlepas dari adanya perbedaan dalam memberikan nama Negara Indonesia, spirit keislaman tidak dapat dilepaskan dari konteks keindonesiaan, sebagaimana spirit keindonesiaan tidak bisa dipisahkan dari warna keislaman di Indonesia.

*Spirit keislaman, keindonesiaan dan demokrasi dalam pandangan KH Abdurrahman Wahid*

Dalam *Islamku, Islam Anda dan Islam Kita*, Abdurrahman Wahid mengatakan sebagai berikut. Pengembaraan penulis, menyembulkan dua hal sekaligus: di satu pihak, pengalaman pribadi penulis yang tidak akan pernah dirasakan atau dialami orang lain, dan sekaligus kesamaan pengalaman dengan orang lain yang mengalami pengembaraan mereka sendiri. Apakah selama pengembaraan itu berakhir pada eklektisme yang berwatak kosmopolitan, sedangkan pada orang lain pengembaraan mereka membawa hasil sebaliknya, tidaklah menjadi soal bagi penulis. Pengalaman pribadi orang tidak akan pernah sama dengan pengalaman orang lain. Dengan demikian, kita justru harus merasa bangga dengan pikiran-pikiran sendiri yang berbeda dari pemikiran orang lain. Dari kenyataan itulah, penulis sampai pada kesimpulan, bahwa Islam yang dipikirkan dan dialaminya adalah sesuatu yang khas, yang dapat disebutkan sebagai “Islamku”, hingga karenanya watak perorangan seperti itu patut dipahami sebagai pengalaman pribadi, yang patut diketahui orang lain tanpa memiliki kekuatan pemaksa. Kalau pandangan ini dipaksakan juga, akan terjadi dislokasi pada diri orang lain, yang justru akan membunuh keindahan semula dari pandangannya sendiri. Hlm.67....

Adapun pandangan yang mementingkan masa depan Islam, sering juga disebut “Islam Kita”. Ia dirumuskan, karena perumusnyanya merasa prihatin dengan masa depan agama tersebut, sehingga keprihatinan itu sendiri mengacu kepada kepentingan bersama kaum muslimin. Suatu kesimpulan dalam “Islam Kita” ini mencakup “Islamku” dan “Islam Anda”, karena ia berwatak umum dan menyangkut nasib kaum muslimin seluruhnya, di manapun mereka berada.

Kesulitan dalam merumuskan pandangan “Islam Kita” itu jelas tampak nyata di depan mata. Bukankah pengalaman yang membentuk “Islamku” itu berbeda isi dan bentuknya dari “Islam Anda”, yang membuat sulitnya merumuskan “Islam Kita”? Di sini, terdapat kecenderungan “Islam Kita” yang hendak dipaksakan oleh sementara orang, dengan wewenang menafsirkan segala sesuatu dipegang mereka. Jelas, pemaksaan kehendak dalam bentuk pemaksaan tafsiran itu bertentangan dengan demokrasi. (hlm.68-69) (Sumber : Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda dan Islam Kita*, Agama Masyarakat Negara Demokrasi, The Wahid Institute, 2006.)

Pandangan KH Abdurrahman Wahid seperti ini menjadikan gagasan Negara Islam baginya merupakan “ilusi”. Karena **Negara agama dimana aturan-aturan agama secara otomatis menjadi aturan-aturan negara, dan kepemimpinan keagamaanpun sekaligus menjadi pemimpin negara tidak mungkin diwujudkan di Indonesia**. Oleh karena itu peran agama di Indonesia, idealnya hanya dijadikan sebagai landasan etika, moral dan spiritual. Apakah agama dapat dijadikan ideologi? Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, ideologi apapun semestinya dibolehkan untuk diekspresikan atau diperjuangkan termasuk ideologi agama, akan tetapi dalam implementasinya, ia harus menjadi sub-ideologi Pancasila karena ia tidak boleh bertentangan dengan ideologi Pancasila dan konstitusi Indonesia.

Itulah sebabnya KH Abdurrahman Wahid, dalam kapasitasnya sebagai tokoh NU maupun tokoh nasional, menolak gagasan dan gerakan transnasional yang mengungus ideology Wahabi atau Ihwanul Muslimin.

Buku *Ilusi Negara Islam* menjelaskan bahaya identifikasi Islam dengan ideology Wahabi/ Ihwanul Muslimin. Karena akan membodohi umat Islam. Di Indonesia, gerakan ini telah menyusup ke bidang-bidang kehidupan bangsa Indonesia, terutama ormas-ormas Islam

moderat, institusi pendidikan dan pemerintahan; dan dengan dalih membela dan memperjuangkan Islam, melakukan *cultural genocide* untuk menguasai Indonesia.

Formalisasi agama (baca: Islam) yang mereka lakukan hanya dalih untuk merebut kekuasaan politik. Merespon gerakan ini, Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa bahwa khilafah Islamiyah tidak mempunyai rujukan teologis baik di dalam al-Qur'an maupun Hadits. PBNU mengingatkan bahwa ideology transnasional berpotensi memecah belah bangsa Indonesia dan merusak *amaliyah diniyah* umat Islam. Ketegangan kelompok moderat dengan gerakan garis keras adalah manifestasi perseteruan *al-nafs al-muthmainnah* dengan hawa nafsu. Pengetahuan yang terbatas membuat hawa nafsu tidak mampu membedakan antara *wasilah* (jalan) dan *ghayah* (tujuan). Dalam memahami Islam pun kerap mempersetankan ayat-ayat lain yang tidak sejalan dengan ideologinya. Hal ini mencerminkan hilangnya daya nalar dalam beragama.

Apakah KH Abdurrahman Wahid dapat dikategorikan sebagai tokoh sekelur karena dukungannya terhadap demokrasi? Menurut hemat penulis, apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh KH Abdurrahman Wahid mencerminkan tekadnya untuk melanjutkan tradisi Sunni dalam melihat relasi agama dan Negara, tradisi yang amat jelas digambarkan oleh al-Ghazali dan al-Mawardi sebagai hubungan simbiotik mutualistik. Dalam perspektif Ahmed Kuru, KH Abdurrahman Wahid dapat dikategorikan sebagai pendukung sekularisme passif, bukan sekularisme aktif.

#### *Spirit keislaman, keindonesiaan dan demokrasi dalam pandangan KH Masdar Farid Mas'udi*

Dalam konteks syarah Pembukaan UUD 1945, Masdar menegaskan, bahwa konstitusi dalam konteks negara modern yang majemuk selalu dimuati nilai-nilai luhur yang bersifat universal dan hal-hal dasar yang bisa disepakati bersama oleh segenap komponen warga yang bersangkutan, meskipun masing-masing punya latar belakang agama, keyakinan maupun budaya berbeda-beda. Oleh sebab itu tidak ada negara modern yang majemuk yang konstitusinya secara langsung merujuk pada bunyi kitab suci agama tertentu. Pola ini secara gamblang telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai tokoh utama pembentuk negara Madinah yang modern dan majemuk. Nabi SAW pada saat itu tidak punya pretensi sedikitpun untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai Konstitusi Madinah. Konstitusi Negara Madinah adalah hasil negosiasi dan kesepakatan semua komponen masyarakat yang diperlakukan sama, meskipun memiliki latar belakang agama beragam. Demikian pula dalam UUD 1945, secara yuridis konstitusional memproteksi hak warga negara mengenai kebebasan bagi pemeluk agama untuk menjalankan kewajibannya. Pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 disebutkan yaitu "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Sehingga dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 mempunyai nilai keislaman yang tinggi yang berhubungan dengan aqidah (keyakinan) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Prinsip ketuhanan berangkat dari keyakinan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang dilahirkan untuk mengemban tugas sebagai khalifah di bumi dengan tugas utama mengelola alam sedemikian rupa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama seluruh umat manusia dan segenap makhluk hidup, serta untuk menjaga kesinambungan alam itu sendiri.

Prinsip ketuhanan juga berarti bahwa tindakan setiap manusia termasuk dalam mengelola bangsa dan negara akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Di samping itu penataan hubungan antara agama dan negara harus dibangun atas dasar simbiosis mutualisme di mana yang satu dan yang lain saling melengkapi. Dalam konteks ini agama memberikan kerohanian yang dalam sedangkan negara menjamin kehidupan keagamaan. Artinya negara sebagai lembaga publik harus melindungi hak dan kepentingan warganya yang

termuat dalam konstitusi, termasuk kebebasan beragama tanpa membedakan antara penganut yang satu dan penganut agama yang lain.

Sebagaimana dikatakan Prof Dr Moh. Mahfud MD dalam pengantarnya, buku Syarah Konstitusi memberikan rujukan dalil-dalil naqliyyah untuk hampir semua ketentuan di dalam UUD 1945. Dari buku ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kandungan konstitusi Indonesia adalah islami. Ini berarti, Indonesia dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 adalah negara yang islami, tapi bukan negara Islam. Negara Islami secara resmi tidak menggunakan nama dan simbol Islam, tapi substansinya mengandung nilai-nilai Islam. Pemahaman tersebut sangatlah penting untuk menyempurnakan kepribadian setiap warga negara sebagai warga bangsa yang religius. Karena eksistensi konstitusi dalam kehidupan bernegara sebuah negara merupakan sesuatu yang sangat krusial sekaligus integral, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan. (Sumber : <http://www.nu.or.id/post/read/27057/membedah-jiwa-konstitusi-indonesia-yang-plural-dan-islami> diakses 2 Februari 2016)

### *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sebagai Buah dari Spirit Keislaman dan Keindonesiaan*

Spirit keislaman yang masuk kedalam spirit keindonesiaan akan melahirkan spirit keislaman yang membawa maslahat bagi rakyat, melahirkan semangat cinta kasih (rahmat ) antar sesama manusia , adil dan bijaksana. Karena itulah sejatinya perwujudan syariat Islam bila dilaksanakan dengan sebenarnya. Ibn Qayyim dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqi'in*, beliau menyatakan, *fa inna al-syari'ata mabnaha wa asasuha 'ala hikamin wa mashalih al-'ibad fi al-ma'asy wa al-ma'ad wa hiya 'adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa mashalihun kulluha wa hikmatun kulluha*. (Sumber: Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in*, jilid III, Bairut Dar al-Kutub al-Ilmia, hlm. 37. Atau Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in*, jilid I, Dar Ibn Al-Jauzy, Hlm 41.)

Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dapat didiktekan oleh satu pihak atau satu kelompok saja. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan keadilan social yang dirumuskan bersama-sama dan dapat dirasakan hasilnya juga secara bersama-sama. Gagasan inilah yang dapat ditangkap dari karya KH Abdurrahman Wahid dan KH Masdar Farid Mas'udi.